

INTERNASIONALISASI POTENSI SULAWESI BARAT (Studi Kasus: Investasi Asing di Sulawesi Barat)

Muhammad Nasir Badu, Ph.D

Dosen Jurusan Hubungan Internasional

Universitas Hasanuddin

nasirbadu@yahoo.com

Abstrak

This research is aimed at observing the efforts of West Sulawesi government to sell its local potentials to international markets. To achieve this aim, this research applies qualitative descriptive analysis by studying cases of foreign investments to gather detailed empirical data of reseach analysis units. The data are collected through library visit, interviews and observation to obtain both primary and secondary ones. The result shows that the efforts of West Sulawesi government to sell its local potentials are still less even though the opportunities to attract foreign investments are largely available. In order to overcome this issue, there should be a synergic effort to minimize possible heavy challenges.

Keywords: Internasionalisasi, Intervensi Asing, dan Sulawesi Barat

A. Latar Belakang

Investasi asing telah menjadi salah satu instrument dalam pembangunan nasional suatu negara sejak era tahun 1970-an, terutama bagi negara-negara berkembang yang mengandalkan pengelolaan dan produksi sumber daya alamnya pada modal yang bersumber dari luar negeri. Keterbatasan modal, infrastruktur, sumber daya manusia dan manajemen menyebabkan negara-negara berkembang mengandalkan investor asing untuk mengelola sumber daya alamnya yang memiliki perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mengeksplorasi sumber daya alam tersebut. Kebutuhan akan investor asing ini menjadi kebutuhan mutlak bagi negara-negara berkembang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang memadai sebagai indikator dalam memacu pembangunan.

Investasi dalam perekonomian merupakan motor penggerak yang dapat memperluas kapasitas produksi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa peranan investasi di samping dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi juga sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan lapangan kerja. Peranan investasi dalam perekonomian yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat

meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk, dan penciptaan lapangan kerja. Melalui investasi maka kegiatan ekonomi dapat berkembang dan kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Jadi investasi merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi suatu perekonomian yang sedang membangun disamping faktor pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi¹.

Pada umumnya negara berkembang meyakini investasi sebagai suatu keniscayaan karena investasi merupakan salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.

Alasan pertama suatu negara membuka diri terhadap investasi asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), memperluas lapangan kerja, pengembangan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non-migas untuk meningkatkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal. Dari sudut pandang ini jelas bahwa pelaksanaan investasi asing merupakan suatu keniscayaan bagi negara berkembang.

Investasi diyakini bahwa secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang dimiliki oleh investor. Diakhir sekali bahwa modal asing secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi suatu negara.

Dewasa ini, Indonesia masih sangat mengandalkan investasi asing dalam membiayai pembangunan. Investasi dalam bentuk penciptaan nilai tambah ekonomi, akan mendorong pembukaan dan perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemudian pada gilirannya akan menstimulasi konsumsi masyarakat dan kemudian memperdalam pasar domestik. Karena itulah komponen investasi seringkali dijadikan patokan dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi. Kinerja investasi saat ini menunjukkan

¹Imamudin Yuliadi, *Analisis Kesenjangan investasi Asing (PMA) di Propinsi Sulawesi Utara: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah* (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 10(1): 1-12,2009)hal.2-3.

trend positif yang cukup solid, bahkan di saat perekonomian global mengalami perlambatan, investasi menjelma menjadi salah satu komponen utama penopang pertumbuhan ekonomi menggantikan kinerja ekspor yang cenderung melambat. Data pertumbuhan ekonomi terbaru keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komponen investasi triwulan III 2012 tumbuh 10,02% dibanding triwulan yang sama tahun 2011. Bersama dengan komponen konsumsi rumah tangga, keduanya menopang pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran 6,17 persen.

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah. Investasi dikenal dengan dua jenis: investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung adalah dimana investor langsung memperoleh hak atas surat berharga atau kekayaan yang terdiri atas aset riil². Sedangkan investasi tidak langsung pada umumnya merupakan investasi jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Investasi ini di sebut sebagai investasi jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka perjual belikan³.

Pemerintah daerah dalam penetapan peraturan untuk penyelenggaraan rumah tangga daerah merupakan dasar bagi daerah otonom. Masing-masing daerah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan rumah tangga, harus didukung sumber pendapatan daerah, sehingga setiap daerah senantiasa berusaha untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya. Salah satu urusan pemerintah yang diatur dengan peraturan daerah adalah pengaturan yang berkaitan investasi di daerah baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Semua daerah di dorong untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menarik investasi asing dan meningkatkan peranannya dalam memacu pembangunan daerah yang secara akumulasi akan berpengaruh terhadap performa ekonomi nasional. Banyak daerah sangat responsive dalam menyikapi investasi asing ini. Salah satu diantaranya adalah propinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 investasi di Sulawesi Barat telah menembus angka

²Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: UII Press 2005)

hal.124

³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia* (Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2006) hal. 2

Rp 133 miliar lebih. Dimana terdapat sekitar empat perusahaan internasional telah menanamkan modalnya untuk pengelolaan potensi sumber daya alam di Mamuju.

Empat perusahaan asing yang telah menanamkan investasi itu di antaranya PT. Bio Energi Indoko dari Korea Selatan dengan nilai investasi sekitar Rp 24,950 miliar. Perusahaan Korea Selatan ini bergerak di bidang usaha hutan tanaman industri dengan merekrut 98 orang tenaga kerja. PT. Max Prima Coal yang bergerak pada bidang pertambangan umum serta perdagangan ekspor dan impor dengan total investasi Rp 8 miliar. Dua perusahaan asing lainnya adalah PT. Tattely TGS Novec Gamatera asal Belanda yang telah mengelola tambang minyak dan gas (migas) dengan nilai investasi Rp 56,460 miliar. Perusahaan Tattely ini masih dalam tahap survei seismik 3D. Tentunya, kita berharap ada tetesan migas yang dihasilkan dalam rangka mendukung perputaran ekonomi masyarakat di Mamuju dan Sulawesi Barat pada umumnya. Dari PT. Stat Oil Asa Norwegia dan Pertamina yang telah melakukan eksplorasi tambang migas di blok Karama Mamuju dengan nilai investasi tidak kurang dari Rp 44,37 miliar. Empat investasi asing di Mamuju ini merupakan anugerah yang diharapkan mampu meraup hasil untuk kemakmuran rakyat sehingga kelak daerah ini bisa lebih cepat berkembang mengejar provinsi lain yang telah mapan.⁴

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi sumber daya alam sehingga cukup mendukung masuknya investasi baik dari sektor tambang migas, mineral dan logam maupun sektor hasil-hasil pertanian maupun perkebunan yang tersebar luas di lima kabupaten. Dengan mendukung infrastruktur jalan nasional yang semakin membaik dan memadai bukan hanya itu juga termasuk optimalnya aktivitas penerbangan di bandara Tampapadang Mamuju, sehingga memicu para investor semakin bergairah untuk melakukan investasi di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan investasi yang masuk di Sulawesi Barat dapat dimanfaatkan dengan baik karena ini merupakan peluang untuk menambah peningkatan perekonomian sehingga pemerintah daerah dengan ini dapat membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang kondusif dalam mendorong masuknya investasi asing.

B. Tinjauan Pustaka

Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan

⁴<http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/09/investasi-perusahaan-asing-tanam-modal-di-sulbar-capai-rp133-miliar>. Di akses pada tanggal 15 Juni 2013.

pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakkan mesin ekonomi mengawal pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut Reilly dan Brown Investasi adalah:

Komitmen untuk mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasikan pengorbanan investor berupa : (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi, dan (3) ketidakpastian penghasilan dimasa mendatang.⁵

Tingkat investasi yang tinggi mendorong terjadinya perubahan teknologi yang cepat dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Kehadiran dan peran dari perusahaan asing (multinasional-MNC) sebagai salah satu bentuk investasi dalam interaksi internasional telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik dalam bidang ekonomi maupun secara politis. Dimana MNC tersebut sebagai salah satu aktor non-negara memiliki posisi yang dipandang sangat penting, karena selama ini kebanyakan perhatian dunia internasional terpusat pada negara sebagai aktor utama hubungan internasional.⁶

Kehadiran MNC secara umum telah memberikan manfaat bagi negara penerima dan mitra bisnis lokal di suatu negara. Bahkan jika upaya ini disiasati dengan baik dan pintar bukan tidak mungkin kehadiran MNC dapat memberikan manfaat dan dampak positif yang luas. Menurut James E. Dougherty MNC mempunyai kemampuan menciptakan industri baru yang tentu di satu sisi memberikan keuntungan bagi negara dan seluruh bangsa, namun sebaliknya di sisi lain kekayaan negara justru terkuras.⁷

MNC (*Multi National Corporation*) dapat mempengaruhi alokasi dana investasi bagi antar negara. Jumlah investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC, terutama jika naiknya investasi di cabang luar negeri asal MNC. MNC juga memiliki akses sumber dana

⁵Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)* (Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008) hal.11.

⁶Christopher A Bartlet dan Sumantra Goshal, *Transnational Management : Text, Cases, Reading in Cross Border Management*, (Second Edition, Boston : The Macgrawhill Companies, inc 1995) hal. 2

⁷James E. Dougerty, dan Robert L.Pfahzgraff, Jr. *Contending Theories Of International Relations: A Comprehensive Survey*, (Third Edition, New York : Harper Collins Publisher, Inc., 1990) hal. 225

internasional yang lebih besar yang kemudian menanamkan modalnya di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta resiko yang rendah. Banyak penelitian empiris telah dilakukan untuk mengetahui apakah MNC dapat menambah atau justru mengurangi investasi yang didatangi (*host country*). Dan hal ini umumnya diperoleh hasil, bahwa investasi luar negeri ini sebagai suplemen (menambah) investasi di negara yang bersangkutan. Sebaliknya adapula yang menarik kesimpulan bahwa investasi MNC tersebut menggeser pembentukan modal di negara yang didatangi.

Perusahaan-perusahaan multinasional menjadi kekuatan utama dibalik globalisasi, dan banyak pengamat bersepakat bahwa tidak ada satu pihakpun yang menikmati untung dari globalisasi ini sebanyak yang dinikmati oleh korporasi multinasional. Dengan kekuatan yang lebih besar ketimbang pemerintahan *host nations* (negara asal, tempat korporasi itu berkantor pusat), perusahaan-perusahaan multinasional itu seringkali terlihat memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendiktekan syarat-syarat yang mengunggulkannya. Logisnya, pemerintah sebagai entitas politik yang dipilih oleh rakyat memiliki legitimasi, kekuasaan, dan kedaulatan. Tapi di era globalisasi pemerintah dibuat bertekuk lutut dihadapan perusahaan multinasional.⁸

Tidak dapat dipungkiri di sisi lain, fenomena globalisasi dengan arus modal asing yang deras mengalir ke negara-negara berkembang, menjadi sebuah “keuntungan” tersendiri secara relative bagi pemerintah setempat. Pertama, masuknya sebuah perusahaan asing dapat menambah pemasukan pajak bagi pemerintah, dan kedua, kebutuhan akan tenaga kerja membuka semakin luasnya kemungkinan lapangan kerja bagi sumber daya negara tempat sebuah MNC bercokol.

Manfaat positif dari peningkatan MNC di berbagai negara berkembang dirasakan manfaatnya baik oleh negara, pengusaha dan konsumen dari negara penerima. Berikut ini beberapa pengaruh positif dari kehadiran MNC:

- Menutup defisit neraca transaksi berjalan secara lebih netral. Artinya dibandingkan dengan pinjaman asing dan portfolio investment asing maka MNC banyak terbukti telah menolong penutupan deficit neraca transaksi berjalan dari negara berkembang dengan baik,

⁸Muhammad Ramadhan Adhi, *Globalisasi; Skenario mutakhir kapitalisme*. (Bogor : Al Azhar Press , 2005) hal. 50

- Memberikan efek multiplier positif pada peningkatan pertumbuhan kegiatan industri pasokan dan industri komponen,
- Memberikan efek multiplier yang tinggi pada penyerapan tenaga kerja trampil (lulusan program pasca sarjana dan sarjana) dan tenaga ahli khusus,
- Mempercepat proses transfer teknologi pada perusahaan mitra lokal dan perusahaan lokal yang terkait,
- Memberikan kesempatan peningkatan kegiatan terkait yang dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah,
- Mengurangi tingkat korupsi karena perusahaan MNC umumnya merupakan perusahaan yang go publik.

Dalam keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional. Adi Harsono mengemukakan dampak adanya investasi asing atau perusahaan asing mencakup:⁹

1. Masalah gaji

Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional,

2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis,
3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan, pelatihan dan di bidang penelitian di negara di mana mereka menanamkan investasinya,
4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Dan kehadiran MNC dapat pula menimbulkan beberapa kerugian yang meliputi :

- Produksi yang berlebihan di satu lokalitas dapat merusak kondisi lingkungan hidup,
- Tekanan politik dan iklim investasi yang tidak menguntungkan dapat mendorong perusahaan MNC melakukan relokasi kegiatannya ke tempat lain,

⁹Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010) hal. 110-111.

- Dalam beberapa kasus karena ketidaksiapan sumber daya dan *entrepreneur* lokal untuk berpartisipasi, kehadiran MNC kurang memberikan efek distribusi yang positif.

Walter S. Jones juga mengatakan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional itu merupakan institusi penting dalam sistem global. Dikatakan demikian karena mereka memiliki kemampuan yang cukup tinggi di bidang ekonomi, politik, kemampuan mengolah sumber daya alam dan mampu mengadakan konfrontasi dengan negara. Keberadaan mereka didukung oleh badan-badan internasional seperti, IMF, World Bank, OECD dan lain-lain. Kemudian perkembangan serta aktifitas perusahaan multinasional ini pun didukung oleh pertumbuhan sains dan teknologi yang pesat.¹⁰

Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*).

Investasi asing sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Investasi asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih ketrampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan

¹⁰Walter S.Jones, *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan Politik Ekonomi Internasional dari Tatanan Dunia*. (Terj.) (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama; 1993) hal. 470.

mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Hal ini juga berlaku di Indonesia yang terus memperbaharui berbagai peraturan untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan daerah serta mempercepat peningkatan penanaman modal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal asing di Indonesia. Penetapan undang-undang tersebut juga ditujukan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak cukup hanya berhasil menarik investor, namun yang lebih penting adalah mampu mempertahankan investasi yang ada sehingga mereka merasa betah dan *feel like home* tanpa mengorbankan pekerja. Hal ini berarti bahwa ada kenyamanan bagi investor sehingga investasi yang masuk bisa bertahan. Hal ini tergantung pada itikad baik pemerintah untuk memberikan atmosfir dan iklim berusaha yang baik dan nyaman bagi penanam modal. Selain itu penting juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau pekerja yang ikut terlibat di dalamnya. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah melalui suatu tata kelola yang baik terhadap segenap aspek yang berpengaruh terhadap perekonomian daerahnya.

Peningkatan nilai tambah perekonomian di daerah tersebut akan memberikan dampak positif pada besaran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi, misalnya dalam bentuk sewa tanah, upah, bunga dan keuntungan akan meningkat karena adanya aktivitas penanaman modal. Selain itu, meningkatnya intensitas perekonomian akan membuka peluang kerja bagi perekonomian dan penduduk di daerah sekitar penanaman modal. Dengan demikian, secara langsung dan tidak langsung akan terwujud efek *multiplier* terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Lingkaran ekonomi ini akan semakin besar dengan munculnya investasi pada potensi-potensi baru dalam membangun sektor industri lainnya.¹¹

¹¹Walter S.Jones, *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan Politik Ekonomi Internasional dari Tatanan Dunia*. (Terj.) (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama; 1993) hal. 470.

Dengan diteruskannya kewenangan atas sejumlah urusan pemerintahan, termasuk di bidang ekonomi kepada pemerintah daerah, maka para pelaku usaha akan lebih banyak berhubungan langsung dengan pemerintah daerah, daripada dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, jelas bahwa kinerja dan pembangunan ekonomi nasional akan makin terkait erat dengan kinerja penyelenggaraan fasilitasi usaha oleh pemerintah. Hanya bila masing-masing pemerintahan daerah melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan mengembangkan berbagai inovasi dalam pembangunan ekonomi yang dibarengi pula dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, maka perwujudan suatu perekonomian daerah yang sehat dan berdaya saing serta mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat setempat akan tercipta.¹²

C. Upaya-Upaya dan Strategi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Barat dalam Meningkatkan Investasi Asing

Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) cukup mendukung masuknya investasi di daerah baik sektor tambang migas, mineral dan logam maupun sektor hasil-hasil pertanian maupun perkebunan yang tersebar luas di lima kabupaten. Saat ini minat investasi dari tahun ke tahun terus bergerak naik dan bahkan di tahun ini diprediksi akan meningkat tajam dibanding kondisi tahun sebelumnya. Saat ini sudah ada beberapa perusahaan asing yang hendak berinvestasi dengan total dana tidak kurang dari Rp18 triliun.

Membaiknya iklim investasi di Provinsi Sulawesi Barat, baik PMDN maupun PMA ini dipicu akibat pembangunan infrastruktur jalan nasional yang semakin membaik. Bukan hanya itu, termasuk optimalnya aktivitas penerbangandi bandara Tampapadang Mamuju, memicu para pemodal semakin bergairah untuk melakukan investasi di provinsi ke-33 ini. Karena itu jika rencana proyek pembangunan dermaga pelabuhan Belang-Belang tuntas maka provinsi yang dulunya tertinggal akan mampu sejajar dengan provinsi lainnya.¹³

Guna memperjelas hasil penelitian yang berkaitan dengan investasi asing di provinsi Sulawesi Barat, di sajikan beberapa data dalam perkembangan investasi adalah dalam tabel berikut :

¹² Susilo Bambang Yudhoyono, *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinerji Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*, (Jakarta: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2007) hal. 2-3

¹³ <http://lintasterkininews.com/gubernur-sulbar-optimistis-iklim-investasi-kian-membaik.php>. Di akses pada tanggal 26 November 2013

Tabel 1
Nilai Investasi yang berskala Nasional (PMDN/PMA)
Sulawesi Barat

No.	Jenis Penanaman Modal	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1.	PMDN	1,325,071, 213,030	1,850,441, 703,565	2,749,169, 752,379	5,940,541, 694,463
2.	PMA	0	36,521,80 0,000	570,412,14 4,251	570,412,14 4,251
	Jumlah	1,325,071, 213,030	1,886,963, 503,565	3,319,581, 896,630	6,510,953, 838,714

Sumber Data : BKPM dan P2T Prov. Sulawesi Barat.

Perusahaan yang telah melakukan investasi di Sulawesi Barat tersebar di lima Kabupaten yakni Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara. Dengan rencana investasi yang telah teralisasi sebesar Rp.634.503.933.895, dengan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia 504 orang, dan Tenaga Kerja Asing 21 orang.

Bila ditinjau dari minat pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam rangka penanaman modal asing berdasarkan nama perusahaan investasi asing (PMA) ternyata yang paling banyak diminati dan menyerap investasi asing adalah wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju Utara dengan 5 (lima) perusahaan asing, sedangkan Kabupaten Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju hanya masing-masing 2 (dua) perusahaan asing, dengan nilai investasi yang cukup besar dapat menyerap tenaga kerja Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk lebih jelas tentang perkembangan investasi di Sulawesi Barat dapat dilihat dalam table 2 di bawah ini.

Tabel 2
Perkembangan Investasi Provinsi Sulawesi Barat

O	NA MA PERUSAH AAN	NOMOR & TANGGAL PENDAFTARAN /IZIN PRINSIP/IZIN USAHA	BI DANG USAHA	REALIS ASI INVESTASI	PENYERAP AN TENAGA KERJA	
					IN DONESI A	A SING
Kab. Majene						
	PT. PEARL OIL	-	T ambang Minyak	55,900,000,00 o	4 4	3
	PT. PTT Explorati on And Produksio n Company Limited	-	T ambang Minyak	53,490,000,00 o	4 3	3
	Jumlah I			109,390,000,0 oo	8 7	6
I	Kab. Polewali Mandar					
	PT. Isco Polman Resources	18/PMA/2 007 (Persetujuan Bupati No.	P erdagan gan Besar	33,082,144,251	81	5

		257/2009 Tanggal 21/1/2009	Ekspor			
	PT. Hong Thai Nusantara Energi	797/1/PM A/2008	P ertamb angan & Perdan angan Ekspor	40,000,000,00 0	-	-
	Jumlah II			73,082,144,251	81	5
II	Kab. Mamuju					
	PT. SBI Energy Indonesia	324/1/IP/I/ PMA/2012 Tanggal 22/03/2012	P ertamb angan Batubar a	38,001,700,53 0	2 00	1 0
	PT. EZER Energy	96/1/IP/I/P MA/2012 Tanggal 21/02/2012	Ja sa Pertam bangan & Perdag angan Besar	20,000,000,00 0	15	-
	Jumlah III			58,001,700,53 0	21 5	1 0
V	Kab. Mamuju Tengah					

	PT. Bio Energi Indoko Korea Selatan	875/1/PM A/2009 Tanggal 23/07/2009	P erusaha an HTI	24,950,000,00 0	9 8	
	PT. Max Prima Coal	337/1/PM A/2008 Tanggal 11/3/2008	P ertamb angan Umum serta Perdan gan Ekspor/I npor	8,000,000,000	17	-
	PT. Tattely TGS Novac Gematera	-	T ambang Minyak	56,460,000,00 0	-	-
	PT. Stat Oil Asa Norwegia dan Pertamina	-	T ambang Minyak	44,370,000,00 0	-	-
	PT. Wahana Karya Sejahtera Mandiri	287/1/IP/1/ PMA/2011 Tanggal 10/05/2011	P erkebu nan Kelapa Sawit	6,090,089,114	6	-
	Jumlah III				12	

				139,870,089,114	1	
	Kab. Mamuju Utara					
	PT. EXON MOBILE	-	T ambang Minyak	54,400,000,000	-	
	PT. MARATO N INTERNAT IONAL	-	T ambang Minyak	48,070,000,000	-	-
	PT. CONNOC O PHILIPS OIL	-	T ambang Minyak	51,860,000,000	-	-
	PT. Tattely TGS Novec Gematera	-	T ambang Minyak	55,960,000,000	-	-
	PT. Stat Oil Asa Norwegia dan Pertamina	-	T ambang Minyak	43,870,000,000	-	-
	Jumlah IV			254,160,000,000	-	-
	Jumlah I II III dan IV			634,503,933,	504	2 1

	895		
--	-----	--	--

Sumber Data : BKPM Pro. Sulawesi Barat.

Berdasarkan alokasi Investasi menurut sektor bidang usaha perusahaan investasi asing di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009 sampai 2012, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu :

1. Sektor Primer, yang meliputi (Tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan). Sektor tanaman pangan dan perkebunan dengan realisasi investasi Rp. 6.090.089.114 dan sektor pertambangan dengan realisasi investasi Rp. 628.413.844.781. Sedangkan Sektor peternakan, kehutanan dan perikanan tidak terealisasi.
2. Sektor Sekunder dan sektor tersier tidak ada realisasi.
 1. Sektor sekunder yang meliputi (Industri makanan, industri tekstil, industri barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri mineral non logam, industri logam, mesin dan elektronika, industri instrument kedokteran, presisi, optik dan jam, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain dan industri lainnya.
 2. Sector tersier yang meliputi (Listrik, gas, dan air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Untuk lebih jelas, kondisi investasi yang dilakukan menurut bidang usaha oleh perusahaan investasi asing (PMA) pada tahun 2009 sampai 2012, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Berdasarkan Sektor Usaha PMA Provinsi Sulawesi Barat

O	LOKASI	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		ET
				IND		

				ONESIA	SING	
	Sektor Primer					
	Tanaman pangan & Perkebunan	1	6,090,089,114	6		
	Peternakan					
	Kehutanan					
	Perikanan					
	Pertambangan	15	628,413,844,781	498	1	
	Sektor I Sekunder					
	Industri Makanan					
	Industri tekstil					
	Industri barang dari kulit & alas kaki					
	Industri kayu					
	Industri kertas & percetakan					
	Industri kimia & farmasi					
	Industri karet & plastic					
	Industri mineral non					

	logam					
	Industri Logam, mesin & elektronika					
0	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
1	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
2	Industri lainnya					
II	Sektor Tersier					
	Listrik, gas dan air					
	Konstruksi					
	Perdagangan & reparasi					
	Hotel & restoran					
	Transportasi, gudang & komunikasi					
	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
	Jasa					

Lainnya					
Jumlah	16	634,503,933,895	504	1	

Sumber Data : BKPM Pro. Sulawesi Barat

Rencana Proyek /Investasi yang tersebar diberbagai Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat , dapat dilihat dalam daftar tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Perencanaan Proyek/Investasi Provinsi Sulawesi Barat

o	Nama Proyek/ Perusahaan	Lokasi	Rencana/ Realisasi Investasi	Keterangan
	2	3	4	5
	Pembangunan Proyek Bandara Perintis Sumarorong	Kab. Mamasa	Rp. 90,000,000,000	Sudah 2 (Dua) Tahun Anggaran
	Pembangunan Proyek Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi	Kab. Majene	Rp. 90,000,000,000	Sudah 2 (Dua) Tahun Anggaran
	Rencana Pembangunan Rel Kereta Api Makassar - Parepare, Parepare - Mamuju, Mamuju - Palu, Palu - Manado, Manado - Gorontalo	Se - Pulau Sulawesi		Tahap MOU dengan Investor
	Proyek PLTA Karama	Kab. Mamuju		Tahap MOU dengan Investor
	Proyek PLTA Bosowa	Kab. Mamuju		Tahap Permohonan

				Izin
	Proyek Pengantongan Semen Tonasa	Kab. Mamuju		Tahap Permohonan Izin
	PT. Tanjung Lestari Proyek Pengolahan Minyak Proyek	Kab. Mamuju Utara		Tahap Pembangunan
	Pembangunan Jalan Arteri Tapalang - Bandara - Pelabuhan Laut Belang - belang	Kab. Mamuju Utara		Tahap dilaksanakan Awal 2014
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro 3 Paket - PLTM Ulu Mambi 3750 kw - PLTM Bambang 5200 kw - PLTM Aralle 7100 kw	Kab. Mamasa	68,7 M 97,5 M 143,5 M	

Sumber Data : BKPM Pro. Sulawesi Barat¹⁴

Perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Barat, sebagian besar bergerak di bidang usaha Perkebunan yaitu sebanyak 22 perusahaan. Sedangkan untuk bidang usaha tambang gas sebanyak 9 dan bidang usaha perdagangan sebanyak 8 perusahaan. Bidang usaha yang lain yaitu perdagangan 6 perusahaan dan jasa rekreasi hanya 1 perusahaan. Selengkapnya lihat tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perusahaan PMA/PMDN Menanamkan Modal
Prov. Sulawesi Barat

¹⁴Sumber data dari BKPM Pro. Sulawesi Barat

o.	Bidang Usaha	Jumlah Perusahaan
	Perkebunan	22
	Perdagangan	7
	Tambak/Industri	6
	Jasa Rekreasi	1
	Tambang Migas	9
	Jumlah	45

Sumber: BKPMMD Prov. Sulawesi Barat

Sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Barat adalah masuk kategori perusahaan PMDN yaitu sebanyak 27 perusahaan. Sedangkan kategori PMA ada sebanyak 18 perusahaan yang terdiri dari 9 perusahaan PMA lama dan 9 perusahaan PMA baru. Bila dilihat menurut kabupaten, Mamuju menempati peringkat pertama untuk daerah yang diminati investor baik PMDN maupun PMA yaitu secara keseluruhan berjumlah 24 perusahaan. Secara rinci persebaran perusahaan PMA dan PMDN per kabupaten bisa dilihat pada tabel di bawah ini¹⁵.

Tabel 6
Persebaran perusahaan PMA dan PMDN
Prov. Sulawesi Barat

o.	Kabupaten	PMD N	PMA (Lama)	PMA(Baru)	J umlah
	Mamuju	19	3	2	24
	Majene	0	2	3	5
	Polman	1	4	1	6
	Mamasa	1	0	0	1
	Matra	6	0	3	9

¹⁵<http://bkpmd.sulbarprov.go.id/index.php/k2-showcase/potensi-investasi/penanaman-modal> di akses tanggal 10 September 2013

Jumlah	27	9	9	4
				5

Sumber: BKPM Pro. Sulawesi Barat

Keberadaan Perusahaan Asing/MNC di Provinsi Sulawesi Barat, memicu lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan MNC pula tidak hanya menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja tetapi juga dapat menyelenggarakan training. Di samping ingin berinvestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modalnya dengan melalui kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tertuang dalam road map investasi, sehingga pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat memfokuskan pada tiga bidang utama yang memiliki nilai strategis dalam sektor investasi, yaitu 1) Bidang Pangan, 2) Bidang Energi dan 3) Bidang Infrastruktur.

Penentuan investasi unggulan Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada sembilan kriteria yaitu: Ketersediaan Sumber Daya Alam, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Skala Investasi, Pasar Lokal, Pasar Ekspor, Kebijakan/Legal, Infrastruktur, dan Lingkungan. Dalam investasi yang ingin dicanamkan pemerintah Sulawesi barat dapat kita lihat dalam tabel daftar Investasi Indikatif dan Usulan Daerah Sulawesi Barat di bawah ini :

Tabel 7

Daftar Investasi Indikatif dan Usulan Daerah Prov. Sulawesi Barat

o.	Indikatif Investasi	Usulan Daerah
	Pengembangan Industri Hilir Tanaman Pangan	Industri Pengolahan Kakao
	Pengembangan Industri Tanaman Pangan Lokal	Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut
	Pengembangan Industri Tanaman Pangan	Industri Pengolahan Kelapa Sawit
	Pengembangan Industri Hilir Perikanan	Budidaya dan pengolahan Ikan Laut

Sumber: BKPM Pro. Sulawesi Barat

Selain dari daftar investasi indikatif dan usulan daerah Sulawesi Barat diatas, dapat pula kita liat daftar potensi Investasi Unggulan Menurut Bidang yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.¹⁶

Tabel 8
Daftar Potensi Investasi Unggulan Berdasarkan Bidang

o.	Jenis Investasi	Daerah
.	Bidang Pangan	
	Pembangunan Industri Hilir Pengolahan Kakao	Kab. Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mandar
	Budidaya da pengolahan rumput laut	Kab. Majene, Mamuju dan Polewali Mandar
	Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Sawit	Kab. Mamuju dan Mamuju Utara
	Budidaya dan Pengolahan Ikan Air Laut	Kab. Majene
.	Bidan Energi	
	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hydro 1600-1850 MW	Kec. Bonehau, Kab. Mamuju
	Pengembangan Penambangan Batubara	Kec. Bonehau, Kab. Mamuju
.	Bidang Infrastruktur	
	Pengembangan Lapangan	Kab. Mamuju

¹⁶<http://bkpmd.sulbarprov.go.id/index.php/k2-showcase/rekomendasi-investasi>. di akses pada tanggal 15 Desember 2013

Udara Internasional Tanpa Padang	
Pembangunan Pelabuhan Laut Belang-Belang dan Terminal Peti Kemas Terpadu	Kab. Mamuju
Pembangunan Jalur Kereta Api	Mamuju sampai Makassar

Sumber: BKPM Pro. Sulawesi Barat

Selain dari upaya memberikan pelayanan yang prima dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada Undang-Undang No. 25/2007 tentang penanaman modal. Prinsip-prinsip dalam regulasi baru ini adalah perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal, tidak ada batas minimum penanaman modal, bebas untuk merepatriasi investasi dan keuntungan, jaminan hukum, penyelesaian perselisihan, dan pelayanan lain yang dibutuhkan dalam berinvestasi. Selanjutnya untuk perbaikan iklim penanaman modal telah diterbitkan Peraturan Presiden No.27/2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan aturan ini penanam modal tidak perlu lagi mengurus sendiri ke kementerian sektoral karena kewenangan untuk itu telah diberikan kepada BKPM. Lebih lanjut kebijakan ini diimplementasikan dalam sistem elektronik sehingga aplikasi penanaman modal dapat dilakukan secara on-line.¹⁷

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM dan P2T) Provinsi Sulawesi Barat, menyiapkan strategi perbaikan iklim Investasi dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan ekonomi di daerah itu. Menurut Kepala BKPM dan P2T Provinsi Sulawesi Barat Rapat Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) 2014-2025, hal yang sangat penting karena untuk menyusun konsep rencana perbaikan iklim investasi suatu daerah. Penyusunan RUPMP ini sekaligus untuk mensinergikan perumusan dokumen perencanaan jangka panjang tentang arah kebijakan bidang penanaman modal dengan instansi terkait maupun dengan pemerintah kabupaten. Penyusunan RUPMP tersebut juga memperhatikan RUPMK serta mengacu kepada RUPM Pusat dan prioritas pengembangan yang ada di daerah. Hal ini

¹⁷Didiek Hadjar Goenadi : *Perkembangan, Prospek, Dan Kebijakan Penanaman Modal Disektor Pertanian*. Komite Penanaman Modal Bidang Agribisnis (Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, 2011) hal. 32-33

dimaksudkan agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal.

Hal yang paling penting dalam penyusunan program strategis dalam tujuan investasi ini dengan memperhatikan lima arah kebijakan dan menjadi isu strategis dan tantangan dimasa depan khususnya bidang penanaman modal di Provinsi Sulawesi Barat diantaranya adalah :

1. Perbaiki iklim investasi
Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif
2. Menciptakan promosi dan kerjasama investasi lokal, regional Sulawesi, nasional dan internasional
3. Memaksimalkan pelayanan, pengendalian dan proses perizinan penanaman modal
4. Memfasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal
5. Merumuskan dan meningkatkan regulasi penanaman modal.

D. Kendala dan Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Barat dalam Meningkatkan Investasi Asing

Secara umum, iklim investasi di Indonesia, dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Beberapa perusahaan multi-nasional menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah. Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain :¹⁸

1. Terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara.
2. Dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu saja. RRC diperkirakan tetap menjadi negara tujuan terbesar arus masuk PMA yang mengalir ke kawasan Asia karena didukung

¹⁸Bappenas, 2003, *Perekonomian Indonesia Tahun 2003: Prospek dan Kebijakan*, Jakarta.

oleh pertumbuhan pasar dalam negeri yang tinggi, biaya produksi yang murah, dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai.

Sedangkan secara internal, sejumlah faktor yang dinilai menghambat investasi di Indonesia, antara lain:

1. Masih adanya gangguan keamanan pada beberapa wilayah yang meskipun bersifat lokal namun dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap iklim investasi nasional. Selain itu, masih maraknya aksi teror bom di berbagai wilayah juga telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor untuk menanamkan modalnya atau paling tidak menunda realisasi dari rencana investasinya.
2. Kurangnya kepastian hukum yang selanjutnya mengakibatkan ketidakpastian hak milik (property right) dan perjanjian usaha di Indonesia serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga.
3. Kurang kondusifnya pasar tenaga kerja di Indonesia. Dengan produktivitas yang rendah dan upah yang sulit diperkirakan secara pasti serta ketidakpastian hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja, daya tarik investasi di Indonesia dari sisi ketenagakerjaan menurun drastis.
4. Tumpang tindihnya kebijakan pusat dan daerah, serta kesimpangsiuran pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang investasi, pemberian insentif, dan perijinan.
5. Prosedur yang panjang dan berbelit mulai dari perijinan hingga kepabeaian yang tidak saja menyebabkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan.
6. Kurangnya insentif investasi, khususnya insentif perpajakan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, insentif perpajakan di Indonesia relatif tertinggal. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia tidak memberikan pembebasan pajak (tax holiday) untuk jangka waktu tertentu dan relatif tertinggal dalam memberikan kelonggaran pajak (tax allowances).

Dalam hal ini banyak permasalahan yang dihadapi oleh investor asing terkait dengan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang penanaman modal asing, yakni :

1. Belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan daerah masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan banyak daerah kabupaten atau kota yang menerbitkan peraturan daerah untuk mengatur investasi, sehingga terjadi tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Dalam hal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya mampu mengeluarkan kebijakan tentang investasi nasional maupun investasi asing yang masuk di wilayah Sulawesi Barat karena peraturan dan kewenangan tentang investasi masih mengacu pada pemerintah pusat.
2. Pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan yang jelas dan komprehensif mengenai kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penanganan investasi asing. Hal ini menyebabkan investor asing bingung, karena tidak adanya kepastian hukum sebagai akibat terjadinya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta konflik kewenangan antar-pemerintah daerah dalam penanganan investasi asing. Sehingga para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Provinsi Sulawesi Barat tidak terealisasi dengan baik.
3. Masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah. Pemerintah mengharapkan antar pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah sehingga dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun pada umumnya, antar pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain masih mengedepankan egonya. Antar pemerintah daerah enggan menjalin kerjasama bahkan menunjukkan persaingan antar pemerintah daerah. Hal tersebut perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat banyak melakukan promosi potensi daerah dan hubungan kerjasama baik antar pemerintah daerah yang lain.

4. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Struktur organisasi pemerintah daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih. Selain itu prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan pelaksanaan standar pelayanan minimum belum mantap. Juga dalam hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah belum optimal.
5. Masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah daerah menyebabkan rendahnya sumberdaya manusia berkualitas menjadi aparatur pemerintah daerah.
6. Masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan terbatasnya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efisiennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme.
7. Infrastruktur Jalan, bandara, dan pelabuhan di Sulawesi Barat kurang memadai sehingga para investor belum sepenuhnya menanamkan modal di daerah tersebut.

Anggapan tersebut teridentifikasi sebagai tantangan yang dihadapi dalam memberdayakan penanaman modal asing, dan telah juga diakui oleh Pemerintah dalam Laporan buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Kendala dan tantangan tersebut antara lain :¹⁹

1. Persaingan kebijakan investasi yang dilakukan oleh negara pesaing seperti China, Vietnam, Thailand dan Malaysia.

¹⁹Aditiawan Chandra, Strategi Menarik Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi, <http://businessenvironment.wordpress.com>. Di akses pada tanggal 10 September 2013

2. Masih rendahnya kepastian hukum.
3. Lemahnya insentif investasi.
4. Kualitas SDM yang rendah dan terbatasnya infrastruktur.
5. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanaman modal asing.
6. Masih tingginya biaya ekonomi, karena tingginya kasus korupsi, keamanan dan penyalahgunaan wewenang
7. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah.
8. Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas.

E. Penutup

- a. Upaya-upaya dan Strategi pemerintah Sulawesi Barat dalam meningkatkan investasi asing melalui berbagai cara diantaranya: perbaikan iklim investasi, mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, menciptakan promosi dan kerjasama investasi lokal, regional Sulawesi, nasional dan internasional, memaksimalkan pelayanan, pengendalian dan proses perizinan penanaman modal, memfasilitasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan merumuskan dan meningkatkan regulasi penanaman modal.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat adalah belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, masih terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah, masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan kurang memadainya infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan di Sulawesi Barat.

Daftar Pustaka

- Bartlet, Christopher A., dan Sumantra Goshal, *Transnational Management : Text, Cases, Reading in Cross Border Management, Second Edition*, Boston: The Macgrawhill Companies, 1995.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research For An Introduction: the Theory and Method*, London, 1982.

- Dougerty, James E., dan Robert L. Pfahzgraff, Jr., *Contending Theories Of International Relations: A Comprehensive Survey*, New York: Harper Collins Publisher, Inc., 1990
- Jeddawi, Murtir, *Memacu Investasi Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007,
- Muhammad Ramadhan Adhi, Muhammad Ramadhan, *Globalisasi; Skenario Mutahir Kapitalisme*. Bogor: Al Azhar Press, 2005.
- Rachbini, Didik J., *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia: Analisis Ekonomi Politik*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Russett, Bruce dan Harvey Starr, *World Politics*. San Francisco: W.H. Freeman, 1985.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Umar, Husein, *Metode Riset Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gramedia, 2003.
- Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan Politik Ekonomi Internasional dari Tatanan Dunia*. (Terj.) Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Yin, Robert K., *Case Study Research Design and Methods*, Washington: COSMOS Corporation, 1989.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinerji Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*, Jakarta: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2007.
- Yuliadi, Imamudin, Analisis Kesenjangan investasi Asing (PMA) di Propinsi Sulawesi Utara: Sebuah Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 10(1): 1-12, 2009.
http://karlinawk-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-60606-PengantarHubunganInternasionalKepentinganNasionaldalamHubunganInternasiona.html. Di akses pada tanggal 15 Juni 2013.
- <http://www.bisnis-kti.com/index.php/2012/09/investasi-perusahaan-asing-tanam-modal-di-sulbar-capai-rp133-miliar>. Di akses pada tanggal 15 Juni 2013.
- Investasi Asing di Mamuju Tembus Rp.133 Miliar, <http://www.antarasulawesiselatan.com/print/41906/investasi-asing-di-mamuju-tembus-rp133-miliar>. Diakses pada 8 September 2014.